

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan Seri III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003).

Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007).

Hatta, Mohammad, *Hukum Tanah Nasional, Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005).

Iskandar Syah, Mudakir, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Jala Permata, 2007).

\_\_\_\_\_, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011).

Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004).

Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cet. V. (Jakarta: Kompas, 2007).

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Perundang-undangan Pertanahan*, (Jakarta: Harvarindo, 2006).

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang–Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5, Lembaran Negara Nomor 104, Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

\_\_\_\_\_, Undang–Undang Republik Indonesia tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya, UU Nomor 20, Lembaran Negara Nomor 288, Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324.

\_\_\_\_\_, Undang–Undang Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU Nomor 2, Lembaran Negara Nomor 22, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## 3. SUMBER PENELITIAN/JURNAL ILMIAH/MAKALAH

Candra, Wahyu, Tesis “*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya*”, (Jawa Tengah: Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010).

Kalo, Syafrudin, Makalah “*Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004).

4. SUMBER INTERNET

“*Rencana Strategis BPN RI 2010-2014*”, terdapat di situs <http://www.bpn.go.id/renstra.aspx>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2012.

“*Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*”, terdapat di situs <http://www.bpn.go.id/tentangbpn.aspx>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2012.

5. KAMUS

